



BRIEFING

PENYIKSAAN DALAM TAHANAN DI WEST PAPUA: IMPUNITAS, KERAHASIAAN, DAN PEMBUNGKAMAN

Pendahuluan

Polisi dan militer di West Papua melakukan banyak penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya, tapi nyaris tidak menghadapi konsekuensi apa pun. Antara September 2021 hingga kuartal pertama 2025, polisi dan militer di Maybrat dan Pegunungan Tengah West Papua tercatat melakukan 138 tindakan penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya terhadap orang-orang yang ditahan. Mayoritas dari mereka yang disiksa adalah laki-laki di bawah usia 24 tahun, 7 orang perempuan dan 7 orang tahanan adalah anak di bawah umur berusia 15-17 tahun. Sebagian besar orang ditangkap karena diduga berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, sementara sejumlah besar lainnya ditangkap karena terlibat dalam demonstrasi. Tingkat keparahan penyiksaan bervariasi, mulai dari penangkapan sewenang-wenang, ancaman dan intimidasi, hingga penyiksaan yang mengakibatkan kematian. Kasus-kasus terakhir ini biasanya terjadi pada warga sipil di daerah-daerah operasi militer dan polisi melawan kelompok bersenjata. Kami menyoroti kasus-kasus ini dan juga kasus-kasus lain ketika lembaga-lembaga penegak hukum — polisi, jaksa, dan hakim — telah gagal melindungi atau secara langsung bertanggung jawab atas penyiksaan terhadap warga sipil. Semua insiden dan kasus yang ada di dalam laporan singkat ini tercatat di dalam basis data Papuans Behind Bars.¹

Penyiksaan di West Papua: Gambaran umum

Di West Papua, lembaga-lembaga negara telah membuat banyak pengecualian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan keadilan dan akuntabilitas demokratis, yang memungkinkan mereka untuk menindak tegas pihak-pihak yang dianggap melawan kekuasaan mereka.² Standar akuntabilitas bagi aparat keamanan dalam kasus-kasus penyiksaan — juga pelanggaran HAM lainnya — hampir tidak ada.³ Orang-orang yang mencoba untuk berekspresi secara bebas di kota-kota pesisir sering dikriminalisasi polisi, menggunakan metode penangkapan sewenang-wenang, penahanan, dan bahkan tuduhan

¹ Tersedia di: tapol.uwazi.io

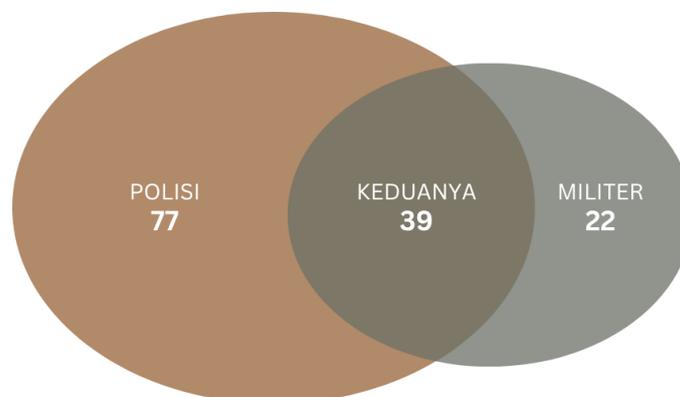
² TAPOL, '[Militerisme yang Mengakar, Pendekatan "Kesejahteraan", dan Politik Pengecualian di West Papua](#)', 8 Desember 2020.

³ Mengacu pada hukum dan standar HAM internasional, penyiksaan adalah "... setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun mental, yang dilakukan secara sengaja terhadap seseorang dengan tujuan memperoleh keterangan atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukum orang tersebut atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya atau diduga telah dilakukannya atau mengintimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atau untuk alasan apa pun yang didasarkan atas diskriminasi dalam bentuk apa pun, ketika rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kerelaan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resminya." Pasal 1, *Convention Against Torture or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1987.

makar.⁴ Di Pegunungan Tengah, masalah akses, belum lagi ancaman dan intimidasi terhadap para saksi dan pembela HAM, membuat pengawasan yang efektif menjadi sulit.

Penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan di West Papua, juga pelanggaran HAM secara umum, ada yang diselidiki oleh aparat keamanan, tetapi sebagian besar insiden tetap tidak diselidiki. Aparat keamanan yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah ketinggalan zaman. Personel militer hanya dapat diadili di pengadilan militer, termasuk untuk pelanggaran HAM serius seperti pembunuhan di luar hukum atau penyiksaan.⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat menyelidiki pelanggaran HAM termasuk penyiksaan, tapi mereka hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk investigasi dan penuntutan lebih lanjut, yang sering kali tidak ditindaklanjuti. Dalam praktiknya, pengadilan militer cenderung menjatuhkan hukuman yang relatif ringan kepada personel berpangkat rendah. Hal ini membuat transparansi dan akuntabilitas untuk kasus-kasus penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi sangat sulit.⁶

Penyiksaan dan penganiayaan lainnya dilakukan di depan umum dan tempat tertutup. Aparat keamanan dengan sengaja menyiksa orang untuk meneror para penonton.⁷ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Banyak kasus penyiksaan dan penganiayaan lainnya yang tercatat terjadi di dalam tahanan, terutama di balik pintu tertutup kantor polisi atau pangkalan militer. Antara 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2024, 138 orang disiksa oleh aparat keamanan selama dalam tahanan. Dari jumlah tersebut, 19 persen di antaranya berusia di bawah 24 tahun, 65 persen laki-laki, 5 persen perempuan, dan 30 persen sisanya tidak diketahui jenis kelaminnya. Tujuh anak di bawah umur, berusia antara 15–17 tahun, juga disiksa dalam tahanan.



Bagan 1 Institusi yang menangkap

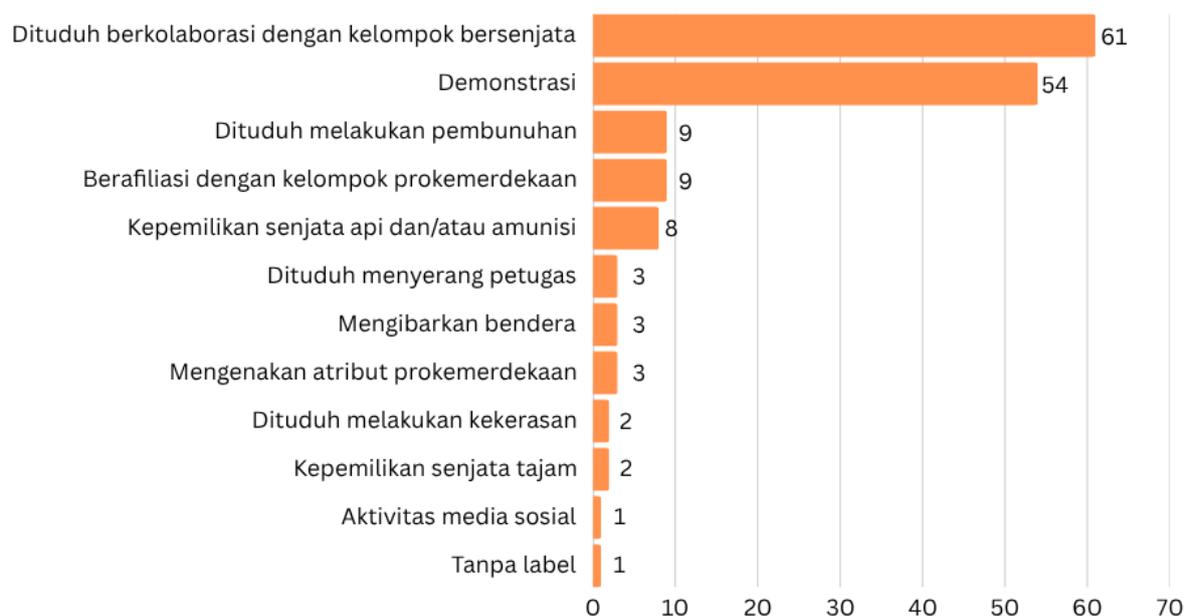
⁴ Lihat TAPOL, '[Laporan Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Berkumpul West Papua 2024](#)', 15 April 2025.

⁵ Dalam sistem peradilan militer hanya ada personel militer sebagai penuntut dan hakim. Tuduhan pelanggaran HAM oleh polisi juga diperiksa oleh sesama polisi, tapi polisi bisa diadili di pengadilan umum.

⁶ AJAR, KontraS, TAPOL, 'Human Rights Court Mechanism and The 2014 Paniai Papua Case', 31 Agustus 2022. <https://tapol.org/publications/human-rights-court-mechanism-and-2014-paniai-papua-case>

⁷ B. Hernawan, 'Torture as a Mode of Governance: Reflections on the Phenomenon of Torture in Papua, Indonesia' dalam J. Munro & M. Slama (ed), *From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities*. ANU Press 2021, hlm. 197.

Tujuh puluh tujuh orang ditangkap oleh polisi, sementara 22 orang ditangkap oleh tentara (penangkapan oleh polisi dan tentara mencapai 59 persen dari keseluruhan). Dua kategori utama orang yang ditangkap adalah demonstran (54 orang), yang banyak di antaranya ditangkap secara sewenang-wenang, atau mereka yang dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata prokemerdekaan Papua (61 orang). Mahasiswa adalah yang paling sering ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi, dan sebagian besar insiden yang melibatkan penyiksaan karena alasan ini terjadi di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua (52 persen). Gabungan dari warga “sipil”, mahasiswa, petugas gereja, dan lainnya, lebih mungkin untuk ditangkap dengan alasan diduga berkolaborasi dengan kelompok bersenjata



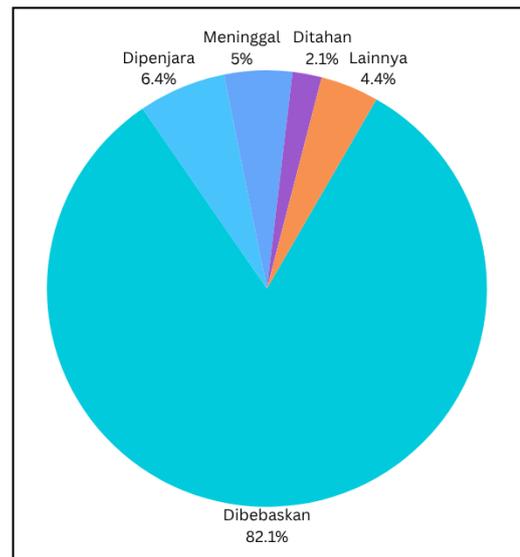
Bagan 2 Alasan penangkapan

Lebih lanjut, penangkapan dalam jumlah yang signifikan disebabkan oleh individu yang dituduh melakukan pembunuhan (9 orang), "berafiliasi dengan kelompok prokemerdekaan" (9 orang) dan juga kepemilikan senjata api atau amunisi (8 orang). Beberapa penangkapan dikelompokkan di sekitar peristiwa-peristiwa penting. Misalnya, 16 orang ditangkap saat peringatan hari-hari besar di West Papua pada 2022. Di lain waktu, aparat keamanan melakukan penangkapan massal saat melakukan operasi. Misalnya, 22 orang ditangkap setelah insiden penyanderaan pilot Susi Air, sementara 22 orang lainnya ditahan dan disiksa setelah operasi "penyisiran" dengan kekerasan di Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, April 2023.

Taktik utama yang dipakai aparat adalah menangkap, menyiksa, kemudian membebaskan mereka yang ditangkap pada hari yang sama, 53 persen di antaranya dibebaskan tanpa dakwaan. Dari 101 orang yang ditahan oleh polisi dan kemudian dibebaskan, 84 persen di antaranya dibebaskan pada hari yang sama.⁸ Angka ini meningkat menjadi 95 persen jika

⁸ Hal ini sering terjadi di West Papua sebagai akibat dari penangkapan sewenang-wenang secara massal, ketika polisi berniat membubarkan demonstran dan mengintimidasi para calon demonstran. Polisi juga biasanya tidak memiliki fasilitas untuk menahan banyak orang yang ditangkap. Yang lebih penting lagi, mereka sering kali tidak memiliki bukti untuk mengajukan tuntutan, sementara KUHAP

pembebasan dilakukan dalam waktu seminggu. Pola ini terjadi pada pelanggaran yang relatif serius seperti berkolaborasi dengan kelompok bersenjata atau jika mereka yang ditangkap hanya menghadiri demonstrasi. Melepaskan orang setelah ditahan satu hari juga terlihat pada penangkapan oleh tentara (57 persen). Meskipun menurut KUHAP, tentara tidak boleh menangkap orang, mereka terus melakukannya dengan memanfaatkan “celah hukum”.⁹ Tentara sangat sering menangkap dan menyiksa orang-orang yang dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata (85 persen dari keseluruhan), dan orang-orang yang ditangkap oleh militer cenderung menghabiskan waktu yang lebih lama dalam tahanan. Sebagai contoh, 20 persen orang yang ditangkap oleh militer menghabiskan waktu sampai satu bulan dalam tahanan.



Bagan 3 Status mereka yang ditangkap

Penyiksaan oleh polisi: prosedur, persidangan, dan vonis yang cacat di kasus Maybrat

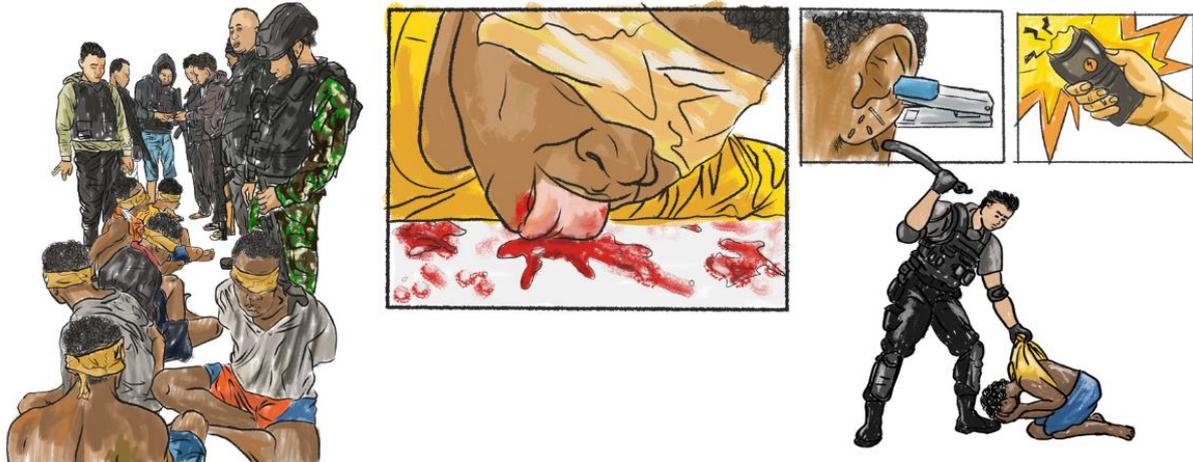
Menyusul serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terhadap pos militer di Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, yang kini menjadi Provinsi Papua Barat Daya, 7 September 2021, militer dan polisi melakukan penyisiran ke kampung-kampung di Aifat Selatan dan menyiksa warga.

Maikel Yaam disiksa dan dipaksa untuk memberikan nama-nama “pelaku” serangan tersebut. Polisi kemudian mengumpulkan enam tersangka, menyiksa mereka di kantor polisi dengan menutup mata mereka dengan lakban, menjepit telinga mereka dan memaksa mereka menjilat darah mereka sendiri di lantai. Mereka juga memukuli keenam orang tersebut dengan kejam, meninju mereka berulang kali dengan tangan bercincin giok. Perlakuan ini juga diberikan kepada LK, seorang anak di bawah umur. Setelah ditangkap, LK hanya didampingi oleh seorang pengacara dalam satu dari dua interogasi polisi, identitasnya diungkap secara publik, meskipun hal ini melanggar KUHAP, dan ia dihukum berdasarkan bukti dari seorang “saksi” yang bahkan tidak memberikan kesaksian dalam persidangan LK yang berlangsung di provinsi yang berbeda. Berlawanan dengan keinginan para terdakwa dan keluarga mereka, enam orang lainnya, yang dikenal sebagai Sorong Enam, juga diadili di provinsi yang berbeda. Pengadilan-pengadilan ini berujung rangkaian vonis yang terus berlanjut hingga 2023, dengan hukuman antara 15 tahun dan penjara seumur hidup, sambil setiap persidangan dipenuhi berbagai kejanggalan.¹⁰

menetapkan bahwa penahanan *resmi* dimulai setelah tersangka menghabiskan 24 jam pertama dalam tahanan.

⁹ Amnesty International 'Indonesia Comments on the draft revised Criminal Procedure Code' 6th September 2006, p.16 <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/005/2006/en/>

¹⁰ TAPOL, 'Maybrat: Return of Displaced People Fails, Injustices Continue', 5 Oktober 2024. <https://tapol.org/briefings/maybrat-update-2>



Gambar 1. Ilustrasi penyiksaan terhadap LK dan Sorong Enam.

Pada 2024, tiga orang lainnya, Apolos Aikingging, Karel Fatem, dan Alowisius Frabuku, divonis bersalah atas keterlibatan mereka dalam insiden Kisor tahun 2021. Kasus-kasus mereka menjadi pengingat atas pelaksanaan prosedur hukum pidana oleh polisi, jaksa, dan hakim, yang janggal sejak kasus kasus Sorong Six. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka diterima sebagai alat bukti di persidangan meskipun para penulisnya diduga melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap para terdakwa dalam tahanan. Adapun penasihat hukum disediakan untuk para terdakwa saat pembuatan BAP, penasihat hukum tersebut dipilih oleh polisi. Dalam persidangan, tidak ada saksi yang dapat mengidentifikasi para terdakwa secara positif, juga tidak ada bukti yang diajukan oleh jaksa yang dapat dihubungkan dengan para terdakwa. Aikingging dan Fatem dijatuhi hukuman masing-masing 20 tahun, sementara Frabuku dipenjara seumur hidup.

Penyiksaan oleh militer dan polisi di Pegunungan Tengah

Beberapa kasus penyiksaan, penganiayaan dan pembunuhan di luar hukum tercatat di seluruh Pegunungan Tengah dan Nabire pada 2024 dan selama kuartal pertama 2025. Pada 3 Februari, di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, militer dan polisi melakukan operasi gabungan setelah sepucuk senjata polisi diduga dicuri di Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak, dua hari sebelumnya. Namun, hal ini tidak diungkap sebagai alasan dilakukannya operasi tersebut. Aparat keamanan berdalih bahwa operasi dilakukan untuk mencegah pembakaran Puskesmas Omukia. Aparat militer dari Satgas Yonif 300 menangkap dua orang, Andinus (Alinus) Murib dan Devius Kogoya, yang sedang melakukan perbaikan atap rumah. Mereka juga menangkap orang ketiga, Werinus Murib, ketika sedang mengumpulkan kayu bakar. Murib dipukuli, diinjak-injak, dan ditendang serta ditikam hingga tewas. Namun seorang juru bicara militer mengklaim bahwa dia meninggal karena melarikan diri dari mobil dan kepalanya terbentur batu. Seorang pembela HAM setempat membantah pernyataan tersebut, dan mengatakan bahwa kaki Murib diikat dan tubuhnya diseret oleh mobil sejauh satu kilometer sebelum ia dibacok hingga tewas.

Pada 30 Juni di Intan Jaya, personil pasukan khusus militer (Kopassus) menangkap Atinus Kum, seorang anggota TPNPB, di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dan menyiksanya selama lima hari, untuk mencari keberadaan pemimpin kelompok tersebut, Aibon Kogoya. Ketika Kogoya tidak ditemukan di lokasi yang diberikan oleh Kum,

pada tanggal 5 Juli, militer dilaporkan membakar sejumlah rumah adat di Mamba, kemudian melemparkan Kogoya ke salah satu rumah yang terbakar, dan menembaknya hingga tewas.

Pada 3 September 2024, personel Polres Nabire menangkap Yeremias Magai, seorang katekis, karena diduga terlibat dalam kematian seorang satpam bernama Supriyono, pada 23 Agustus 2024. Magai, yang juga merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disiksa untuk mendapatkan pengakuan hingga meninggal dalam tahanan polisi. Polisi melakukan penangkapan terhadap dua orang lainnya yang juga disiksa untuk mengakui pembunuhan tersebut. Pengacara keluarga Magai mengatakan bahwa ketika menerima jenazahnya, jenazahnya sudah dipakaikan pakaian pemakaman dan peti mati "disegel" dengan kain dan ditutup. Magai dan dua orang lainnya itu berada di tempat yang 100 kilometer dari lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Menurut keluarga Magai, bukti CCTV yang digunakan oleh polisi untuk menuduh keterlibatan Magai adalah orang yang berbeda. Kapolres Nabire membuat pernyataan kepada keluarga Magai yang isinya mengakui bahwa penangkapan ketiga orang tersebut dilakukan setelah ia mendapat tekanan dari seorang perwira senior militer, yang merupakan saudara dari Supriyono. Hingga akhir September 2024, keluarga Magai telah beberapa kali meminta pertanggungjawaban para pelaku dari pihak kepolisian.

Pada 13 Oktober 2024, di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya — lokasi yang sama dengan penyiksaan dan pembunuhan Atinus Kum — personel militer menangkap dua pemuda yang diduga berkolaborasi dengan kelompok bersenjata. Mereka menangkap salah satunya, SB yang berusia 15 tahun alias masih di bawah umur, dan membawanya ke pos (Yonif 506/BY). Di sana, menurut penduduk setempat, SB disiksa. Orang kedua yang tidak berhenti ketika militer berusaha menangkapnya adalah Pianus Sani, yang secara sukarela akhirnya atas dorongan tetua setempat, menyerahkan diri kepada tentara. SB dibebaskan tetapi Sani disiksa hingga tewas dan mayatnya ditemukan oleh penduduk di pinggir jalan pada 14 Oktober 2024.

Pada 8 Desember 2024, lagi-lagi di Kampung Mamba, seorang anak berusia 16 tahun, Yulianus Abugau, ditangkap oleh anggota Yonif 506/BY, diduga karena berkolaborasi dengan kelompok bersenjata. Ia ditangkap ketika sedang dalam perjalanan untuk mengisi bahan bakar sepeda motor. Mayatnya ditemukan di hutan di belakang pos Yonif 506/BY, dengan tanda-tanda dipukuli dan dibacok. Jenazahnya kemudian dibawa oleh polisi ke rumah sakit setempat sebelum diserahkan kepada keluarga. Yulianus dimakamkan pada 10 Desember 2024 tanpa melalui uji forensik.

Penyiksaan marak terjadi selama berlangsungnya operasi aparat keamanan. Beberapa kasus baru-baru ini yang terjadi di beberapa distrik di Pegunungan Tengah pada 2024 dan Februari serta Maret 2025 menggambarkan masalah tersebut. Pada 27 Februari 2025, di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, setelah bentrokan bersenjata antara TNI dan TPNPB, militer menangkap dua orang dan membawa mereka ke pos militer setempat (Yonif 509/BY). Kedua orang tersebut disiksa, dan ketika salah satu dari mereka dibebaskan, yang lainnya, Goliath Sani yang berusia 19 tahun, diyakini kemudian dieksekusi.¹¹

¹¹ HRM, 'Military Accused of Again Executing Papuan Civilian in Mamba Village, Intan Jaya', 3 Maret 2025. <https://humanrightsmonitor.org/case/military-again-alleged-of-executing-papuan-civilian-in-mamba-village-intan-jaya/>

Pada 4 Maret 2025, militer secara sewenang-wenang menahan seorang tukang ojek berusia 25 tahun di Pos Militer Holohama, Kabupaten Intan Jaya. Punggunya dilaporkan dipukuli selama dalam tahanan. Anggota keluarga dan masyarakat luas menuntut pembebasannya. Setelah negosiasi dengan pihak militer, dia dibebaskan dan dibawa oleh keluarganya untuk berobat.¹² Kurang dari 10 hari kemudian, pada malam tanggal 13 Maret 2025 di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, aparat militer dilaporkan menyiksa lima orang masyarakat adat Papua, yang ditangkap di sebuah rumah adat (*honai*). Kelima orang tersebut baru saja terlibat dalam perselisihan antarsuku. Pihak militer menangkap mereka di bawah todongan senjata, memukuli mereka selama dalam perjalanan ke markas Kodim 1714, tempat penganiayaan terhadap mereka berlanjut. Militer menuduh mereka terlibat dalam kematian seorang prajurit selama kampanye pemilu. Mereka membantah terlibat, dan akhirnya komandan meminta maaf dan menawarkan kompensasi masing-masing Rp300.000 (sekitar £13) sebelum mereka dikembalikan ke rumah masing-masing pada pukul 3 pagi tanpa menerima perawatan medis.¹³

Antara 22–25 Maret, militer secara sewenang-wenang menahan dan menyiksa beberapa orang Papua selama operasi di Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Di Kampung Meborok, dua orang Papua, ayah dan anak, ditangkap pada 22 Maret di sebuah *honai* dan dibawa ke pos militer di lapangan terbang Yuguru. Ratusan orang berkumpul di lapangan terbang menyerukan pembebasan kedua orang tersebut. Komandan militer kemudian memberikan tiga “bukti” yang meragukan (termasuk sebuah unggahan di Facebook) untuk membenarkan penahanan mereka, walau tidak ada yang secara langsung menunjukkan melibatkan mereka. Komandan itu mengatakan kepada penduduk bahwa orang-orang yang ditahan akan dibebaskan pada 24 Maret. Salah satu tahanan, AW, kemudian diyakini telah dieksekusi pada malam tanggal 23 Maret. Mayatnya ditemukan oleh keluarganya, dibuang di sungai setempat.¹⁴

Kesimpulan: Impunitas tanpa akhir

Sejak gelombang baru pertempuran antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia dimulai di Intan Jaya pada Oktober 2024, perilaku aparat keamanan dilaporkan telah menjadi sangat mengerikan karena eskalasi operasi pasukan keamanan yang berdampak pada warga sipil.¹⁵ Namun, cerita penyiksaan di tangan militer dan polisi di Intan Jaya menunjukkan pola pelanggaran yang mengkhawatirkan yang telah berlangsung selama setidaknya delapan tahun.¹⁶ Praktik penyiksaan sangat jelas terlihat dalam tiga kasus warga

¹² HRM, 'Military members torture Papuan man inside military post in Intan Jaya', 5 Maret 2025. <https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-torture-papuan-man-inside-military-post-in-intan-jaya/>

¹³ Ibid.

¹⁴ Suara Papua, 'Operasi Brutal di Kampung Yuguru Abaral Wandikbo Disiksa Hingga Tewas', 6 April 2025. <https://suarapapua.com/2025/04/06/operasi-brutal-di-kampung-yuguru-abaral-wandikbo-disiksa-hingga-tewas/>

¹⁵ HRM 'Military Accused of Again Executing Papuan Civilian in Mamba Village, Intan Jaya', 3 Maret 2025. <https://humanrightsmonitor.org/case/military-again-alleged-of-executing-papuan-civilian-in-mamba-village-intan-jaya/>

¹⁶ TAPOL, 'Terusir dan Tak Berdaya: Ekspansi militer mengorbankan nyawa warga sipil', 5 Oktober 2023, hlm. 11. Setelah membangun kekuatan di daerah tersebut pada 2017 dengan dalih untuk menghentikan kekerasan yang terkait pemilihan kepala daerah, militer kemudian mendirikan beberapa pos setelah serangan terhadap kurir yang dituduh oleh TPNPB sebagai mata-mata pada tahun 2019. Militer kemudian mendatangkan ribuan pasukan di daerah tersebut. Intan Jaya adalah

sipil yang disiksa dan dibunuh tentara di Kampung Mamba, semuanya terjadi pada tahun 2024. Pihak berwenang tidak menunjukkan indikasi bahwa mereka akan menanggapi seruan dari keluarga korban dan pembela HAM agar kasus-kasus ini diselidiki dan para pelakunya diadili.

Penyiksaan polisi di Maybrat berkontribusi pada jatuhnya vonis bersalah terhadap 14 orang, termasuk seorang anak, dalam persidangan yang cacat. Polisi melakukan penyiksaan terhadap para tersangka dengan keyakinan yang sebagian didasarkan pada BAP yang ditulis polisi.¹⁷ Vonis yang dijatuhkan di Maybrat berbeda dengan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum di Pegunungan Tengah. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bagaimana polisi, jaksa, dan hakim telah dibiarkan mengabaikan prosedur hukum pidana demi menghasilkan vonis bersalah. Di West Papua, wilayah yang standar keadilannya sangat dipertanyakan, hal ini dapat menjadi preseden dalam mengikis perlindungan minimal bagi orang-orang yang dituduh terlibat dalam kejahatan serius.

(22 Juli 2025)

kabupaten yang berdekatan dengan tambang emas dan tembaga PT Freeport, yang telah lama dilaporkan sebagai sumber pendapatan bagi aparat keamanan. Konsesi emas Blok Wabu yang sangat besar berada di Intan Jaya dan juga berkontribusi pada keterlibatan militer dan polisi di daerah tersebut, sering kali dengan konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil.

¹⁷ Bahkan hak-hak dasar ini mungkin semakin dilemahkan dalam rancangan UU yang akan datang. Jika berita acara pemeriksaan polisi dibuat opsional, seperti yang diusulkan dalam Pasal 31 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), atau pengaduan terhadap polisi diinvestigasi oleh polisi, maka hal ini akan menghilangkan satu lapisan pengawasan yang memungkinkan lebih banyak ruang untuk praktik penyiksaan. Lihat P. Wahyuningtyas 'Isi RUU Polri Terbaru, Daftar Kontroversi, dan Alasan Ditolak', Tirta.id, 24 Maret 2025.